

RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Renja ini juga merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2025 yang didanai dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2025, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerjaini.

Jambi, Februari 2024
Kepala DPMPTSP



Dr. Donny Iskandar, S.Sos, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19691125 199703 1 004

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran	38
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan dan Pendanaan	51
BAB V. PENUTUP	65

Daftar Gambar

Gambar 1	
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25 Tahun 2004	(2)
Gambar 2.1	
Bagan Alur Proses Pelayanan Perizinan	(16)
Gambar 2.2	
Bagan Alur Proses Pelayanan Pengaduan	(16)
Gambar 2	
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Provinsi	(40)

RENJA DPA-DTSD 2020

Daftar Tabel

Tabel. 2.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	9
Tabel. 2.2	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023	11
Tabel. 2.3	Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023	11
Tabel. 2.4	Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023	13
Tabel. T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	44
Tabel. T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51
Tabel. T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Provinsi Jambi	53
Tabel. T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	57

RENJA DPM-PTSP 2023

REKAM-REKAM-DTSP2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu Tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6 permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat Program/Kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta Rencana Program/Kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari Rangkaian penyusunan APBD.
2. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.

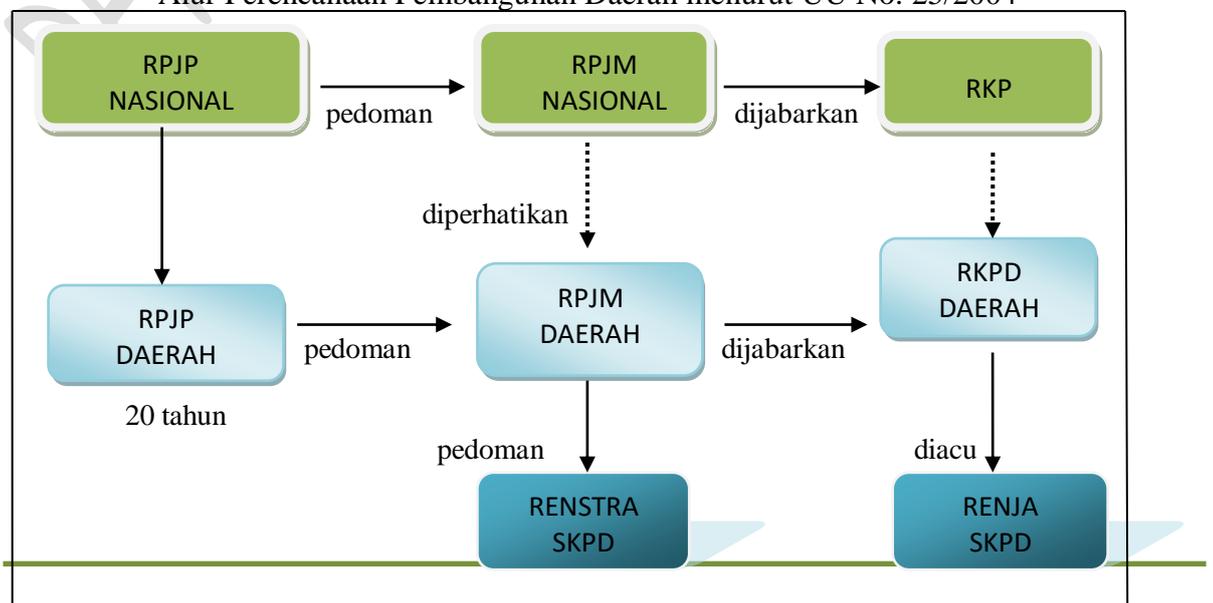
5. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

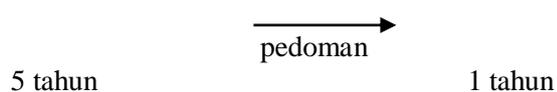
Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004





I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pemabangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;

9. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jambi 2016-2017;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium DevelopmnetGoals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan pendanaan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V.PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU (n-1) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Dari hasil kinerja dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tahun 2023 telah menetapkan 2 Sasaran strategis yang akan dicapai. Ke 2 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 2 Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang **“sangat baik”**. Adapun rincian tingkat capaian masing-masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2022	Tahun 2023			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	89,31 (A)	90 (A)	89,00 (A)	> 100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya realisasi Investasi						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	9,445 (Rp.Triliun)	5,20 (Rp.Triliun)	11,072 (Rp.Triliun)	212,98 %	Sangat Baik
	- PMDN (Rp.Triliun)	8,8 (Rp.Triliun)	4,24 (Rp.Triliun)	10,404 (Rp.Triliun)	245,37 %	Sangat Baik
	- PMA (US\$.Juta)	39,20 (US\$ Juta)	48,00 (US\$ Juta)	45,08 (US\$ Juta)	93,92%	Baik

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **sangat baik**, ini terlihat dari angka pengukuran nilai rata (NRR) Indeks Kepuasan Masyarakat **100 %** jika dilihat pada nilai persepsi maka IKM terhadap pelayanan DPM-PTSP berada pada mutu pelayanan **A (Sangat baik)**.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian "**Sangat Baik**" Realisasi PMDN dengan persentase 245,37 %, untuk Realisasi PMA dengan capaian "**Baik**" dengan persentase 93,92%.

Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan investasi sehingga meningkatnya realisasi investasi (data laporan realisasi investasi triwulan IV). Realisasi nilai investasi DPM-PTSP tahun 2023 untuk PMDN telah mencapai lebih dari target yaitu Rp 11,072 Triliun,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5,20 Triliun,-. Realisasi Nilai Investasi untuk PMA juga mencapai lebih dari target sebesar US\$. 45,08 Juta,- dari target yang telah ditetapkan sebesar US\$. 48 Juta.

B. REALISASI KEUANGAN

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Jambi. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	BELANJA DAERAH	14.037.617.183,00	13.361.627.269,00	95,18
	Belanja Operasi	13.866.585.119,00	13.191.799.769,00	95,13
	- Belanja Pegawai	9.894.240.946,00	9.476.480.035,00	95,78
	- Belanja Barang dan Jasa	3.972.344.173,00	3.715.319.734,00	93,53
2	Belanja Modal	171.032.064,00	169.827.500,00	99,30
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.032.064,00	169.827.500,00	99,30
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	#DIV/0!

Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan Rutin Dinas dan kegiatan teknis penanaman modal yang membiayai 1 Program dan 6 Kegiatan serta 19 Sub kegiatan menyerap Anggaran sebesar Rp.13.361.672.269,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2023 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.243.076.154,-	11.066.918.150,-	98,43
2	Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	170.359.900,-	170.076.079,-	99,83
3	Promosi Penanaman Modal	348.549.291,-	362.316.791,-	99,66
4	Pelayanan Penanaman Modal	632.503.600,-	630.414.863,-	99,67
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.206.392.960,-	1.133.706.212,-	89,21
Total		13.600.881.905,-	13.363.432.095,-	98,12

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 98.12% dan

capaian keuangan sebesar 98,12%. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN/ URAIAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
----	---------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023

				Keuangan	FISIK
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.243.076.154,	11.066.918.150,	98,43	98,43
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.324.863,	142.265.590,	99,96	99,96
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.324.863,	142.265.590,	99,96	99,96
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.846.527.715,	9.699.904.842,	98,51	100,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.511.674.915,	9.365.052.042,	98,46	95,28
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	334.852.800,	334.852.800,	100,00	100,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.975.250,	29.431.001,	98,18	98,18
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.975.250,	29.431.001,	98,18	98,18
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.859.095,	470.125.070,	99,50	99,50
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.003.590,	24.953.705,	99,80	99,80
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.555.695,	136.831.216,	98,76	98,76
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.804.000,	31.231.000,	98,14	98,14
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.378.200,	20.346.800,	99,85	99,85
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.765.310,	257.762.349,	100,00	100,00
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.207.231,	356.726.116,	92,45	92,45
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.520.000,	219.813.084,	88,45	88,45
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.329.011,	136.913.032,	99,70	99,70
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.182.000	368.465.531	99,54	99,54
	1 Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.982.000,	309.265.531,	99,45	99,45
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.200.000,	59.200.000,	100,00	100,00
2	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	170.359.900,	170.076.079,	99,83	99,83
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	170.359.900,	170.076.079,	99,83	99,83
	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	170.359.900,	170.076.079,	99,83	99,83
3	PROMOSI PENANAMAN MODAL	363.549.291,	362.316.791,	99,66	99,66
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	363.549.291,	362.316.791,	99,66	99,66
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	363.549.291,	362.316.791,	99,66	99,66
4	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	632.503.600,	630.414.863,	99,67	99,67
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	632.503.600,	630.414.863,	99,67	99,67
	1 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	190.399.950,	190.399.950,	100	100
	2 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255.000.000,	255.000.000,	100	100
	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	187.103.650,	185.014.913,	98,88	98,88
5	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.206.392.960,	1.133.706.212,	93,97	93,97
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.206.392.960,	1.133.706.212,	93,97	93,97
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	657.806.250,	586.821.066,	89,21	89,21

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	548.586.710,	546.885.146,	99,69	99,69
JUMLAH		13.620.171.385,	13.363.432.095	98,12	98,12

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2023 ada,
- d. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

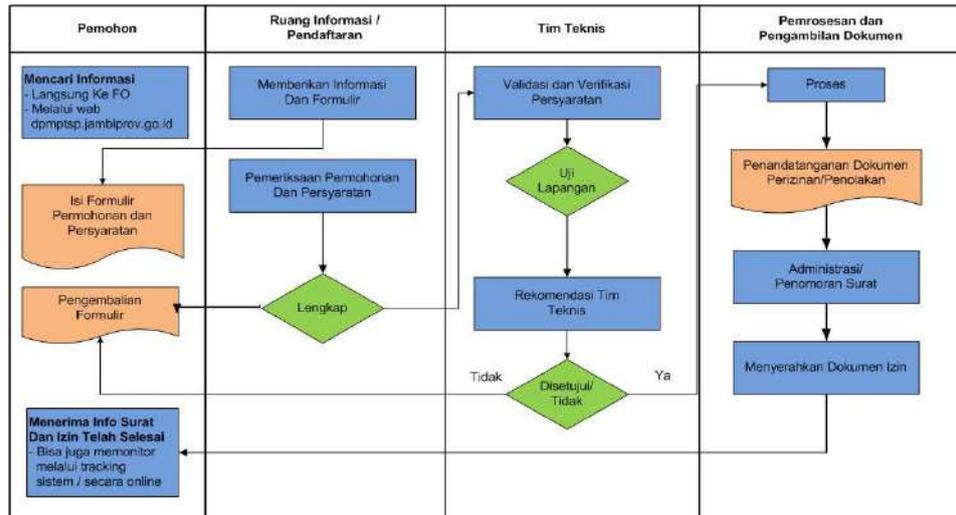
Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jenis Pelayanan

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pemvalidasian, hingga penerbitan perizinan dari permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan. Adapun proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilihat pada gambar berikut :

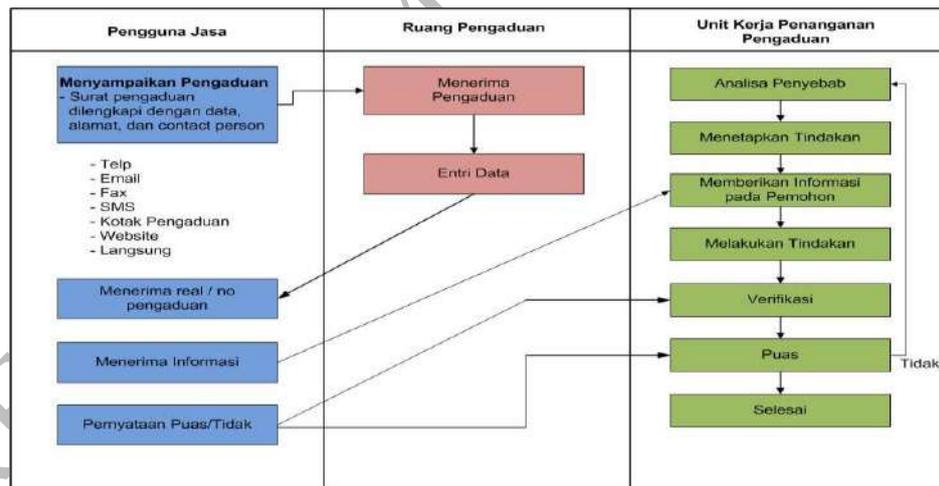
Gambar 2.1
Bagan Alur Proses Pelayanan Perizinan



b. Pelayanan Pengaduan

konsultasi pengaduan dilaksanakan pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Adapun bagan dan alur proses pelayananan pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Bagan Alur Proses Pelayanan Pengaduan



2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi dikelola oleh 2 Bidang yaitu ;

- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dengan pengelolaan perizinan di sector Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan, Perencanaan dan Pembangunan daerah, Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Koperasi dan UKM, Perkebunan dan Bidang Penanaman Modal.
- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dengan pengelolaan perizinan di sector Peternakan, perhubungan dan LLAJ, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, sosial dan tenaga kerja.

b. Pelayanan Pengaduan.

Ruang lingkup Pelayanan pengaduan yang dilakukan berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, secara garis besar laporan yang masuk adalah pelanggaran dari perizinan yang telah diterbitkan. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi adalah menindaklanjuti laporan pengaduan yang ada dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait sampai selesainya pelaporan pengaduan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan berusaha yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mengawal dan melakukan percepatan berusaha, adapun salah satu penyederhanaan perizinan adalah dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan di aplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta pembentukan Satgas percepatan Berusaha di daerah. Guna menghadapi kondisi diatas Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI MANTAP 2021 - 2026.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk dipromosikan kepada para investor guna meningkatkan iklim investasi di Provinsi Jambi yang berdaya saing untuk mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pertumbuhan realisasi investasi, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam rangka penumbuhan realisasi investasi dan peningkatan mutu pelayanan dengan berbagai pihak belum terprogram dan berjalan secara optimal;
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum memadai;
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan;
4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal;
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal;
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2.3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan perangkat daerah terkait (tim teknis) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berjalan dengan baik;

2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan;
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal;
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI MANTAP 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.3.3. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan Online single Submission (OSS) guna penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan rentang birokrasi yang panjang,
- b. Potensi sumber daya alam yang memadai,
- c. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral

maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,

- d. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

- a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran penanaman modal,
- b. Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM Tenaga Kerja Jambi,
- c. Keterbatasan Informasi dan pengaplikasian OSS oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang belum menyeluruh,
- d. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih minim,
- e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
- f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

- a. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas, terarah dan baku;
- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stakeholders yang terkait;
- c. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan;
- d. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta

kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan kompetensi tenaga Aparatur DPMPTSP dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun kepada dunia usaha;
- b. Sikap kemadirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah;
- c. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan DPMPTSP belum membumi/memasyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda (antara lain; penataan kelembagaan perangkat daerah, sinergi perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas dan tata pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan public)
2. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda;
3. Perbaikan kemudahan berinvestasi;
4. Proses perizinan belum efisien;
5. Deregulasi peraturan yang menghambat investasi.

Isu Global

1. Gejolak harga Minyak,
2. Belum pulihnya harga komoditas dan kebijakan Amerika Serikat terkait Suku bunga.
3. Kampanye Anti Minyak Sawit.
4. Krisis Ekonomi Global

Terkait dengan pembangunan daerah secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu **“Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional”** Jambi MANTAP2021-2026, dengan pengertian mampu meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna menjawab semua isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dari semua stake holder bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Jambi; danIdentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja(Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta peningkatan promosi dan kerjasama investasidilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan cara peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemnerian

insentif/kemudahan Penanaman modal, digitalisasi perizinan dan non perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan kelembagaan dan Aparatur DPMPTSP Provinsi Jambi serta memetakan potensi dan pengemasan promosi investasi wilayah menjadi lebih menarik. Memonitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, serta peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan Besar PMA/PMDN.

RENJA DPM-PTSP 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. SEKTOR PENANAMAN MODAL

a. Arah dan Kebijakan BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu : **Pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **Kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 %/pertahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanam modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) no-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*), melalui:

1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UKM;

3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
 5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
 6. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal (*Investor needs*);
 7. Fasilitas proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui :**
1. Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB)
 2. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
 3. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan sistem potensi investasi regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
 4. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM;
 5. Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM;
 6. Pengusulan regulasi terkait intensif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.
- c) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal, melalui :**
1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi dengan negara-negara potensial;
 2. Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan mou penanaman modal yang diimplementasikan;
 3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanaman modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
 4. Peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal; dan

5. Peningkatan kordinasi dengan K/L dan daerah pemanfaatan OSS.

d). Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui :

1. Fasilitas dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
2. Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
3. Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
4. Peningkatan peran dan fungsi kantor perwakilan BKPM diluar negeri (indonesia investment promotion center/ IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

e). Meningkatkan kualitas penanaman modal, melalui :

1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, antara lain melalui :
 - a. Penyempurnaan sistem OSS
 - b. Integrasi sistem K/L ke sisitem OSS
 - c. Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
 - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f. Layanan berbantuan OSS
 - g. Layanan pengaduan
2. Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanaman modal OSS;
3. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP pusat;
4. Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
5. Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal

f). Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui :

1. Eksekusi bimbingan realisasi perusahaan besar ;
2. Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif ;

3. Penyelesaian permasalahan yang di hadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan satgas percepatan berusaha;
4. Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *business intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

g). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui :
 - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kopetensi jabatan;
 - c. Pengembangan kompetensi ASN;
 - d. Pelaksanaan *assessment test*;
 - e. Penyusunan pola karir instansional;
 - f. Pelaksanaan *talent pool*; dan
 - g. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui :
 - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b. Penyusunan dan penerapan *standart operating procedure* (SOP)
 - c. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - e. Peningkatan orgnisasi yng reponsif dan adaptif.
3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui :
 - a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b. Penigkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
 - d. Peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

4. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui :
 - a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2) Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga di arahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :

a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningktan perekonomian yang tinggi;
2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.

b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan :

1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
2. Mendorong peningkatan angka *incremental capital output ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;

2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dengan upaya dalam pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *research & development* (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan :**
1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
 2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran (a.l. *branding*).
- e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan :**
1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
 2. Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN); dan
 3. Peningkatan koordinasi dengan tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
- f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan :**
1. Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
 2. Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek berkelanjutan lingkungan; dan
 3. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan :**
1. Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
 2. Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya diluar pulau jawa;
 3. Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan

4. Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

B. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan arah kebijakan pada RPJM 2021-2026, secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa dengan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang , mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB destinasi wilayah, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antara wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi wilayah metropolitan (WM) dan kota besar di luar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan WM dan kota besar di jawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spesial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-kecil menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
9. Peningkatan kapastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;

10. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Strategi pembangunan berbatas kewilayahan pada kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut :

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui :

- a) Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat pertumbuhan wilayah / kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
- b) Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri, pengolahan, pariwisata dan lainnya.

2. Strategi pemerataan melalui :

Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Peran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pedayagunaan

administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibun-linmas.

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2021-2026, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021-2026 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam negeri mendapatkan penugasan untuk mengawal ketujuh program Nasional (PN) tersebut, yaitu:

- **PN-1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Berkualitas;
- **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- **PN-3** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- **PN-4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- **PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi kewilayahan, yaitu :

1. **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

b. Arah dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB Prioritas strategi dan kebijakan

Kementerian PAN dan RB sesuai rencana strategis Kementerian PAN RB difokuskan pada upaya-upaya:

- a. Penyesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan.
- c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh mencakup:
 - 1). Penyusunan dan penyempurnaan berbagai implementasi perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistematis, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*;
 - 2). Pembinaan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM aparatur dan instansi;
 - 3). Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembinaan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
 - 4). Perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektifitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen dan kenegaraan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pelayanan Publik

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas dan pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Sasaran strategis (SS) BKPM pada tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Indikator kinerja sasaran strategis pertahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2021-2026.

Beberapa target penanaman modal melakukam penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan revisi Target Penanaman Modal Tahun 2021-2026 Akibat Dampak Covid-19. Indikator kinerja sasaran strategis BKPM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
- SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Peringkat Kemudahan Berusaha.
- SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jambi periode 2021-2026 yaitu:

“Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing”

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provisin Jambi 2016-2021 sebanyak 4 sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Investasi, dengan Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:

- Pertumbuhan realisasi investasi.

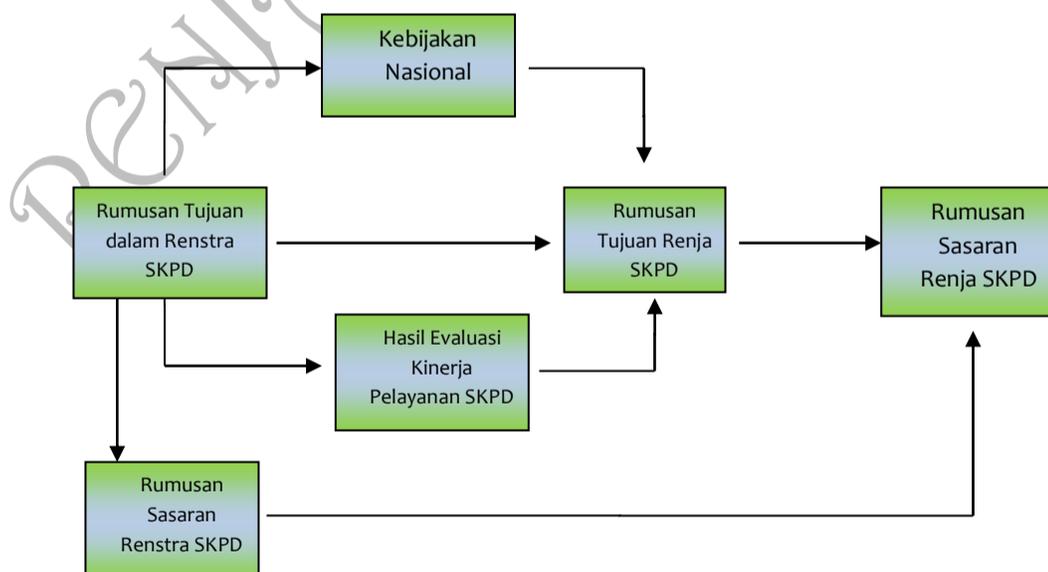
Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah:

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Provinsi





**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun 2024 dan 2025**

Jumlah program : 6

Jumlah kegiatan : 11

Jumlah sub kegiatan : 27

Total pagu 2024 : Rp. 15.321.976.675,-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Lokasi
				Tahun		Perkiraan Maju		
				2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	9	10	9	10	18
X.XX.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							PROVINSI JAMBI
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							PROVINSI JAMBI
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	BB	BB	13.217.000.000	13.426.000.000	13.426.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	8 dokumen	10 dokumen	215.000.000 5	10 dokumen	225.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	8 dokumen	10 dokumen	160.000.000	10 dokumen	175.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	1 laporan	40.000.000	1 dokumen	50.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	10.280.000.000	12 dokumen	10.285.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	10.000.000.000,0	14 bulan	10.000.000.000,0	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02.01.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	370.000.000	12 dokumen	285.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai dan PTT DPMPPTSP Provinsi Jambi	100 paket	100 paket	160.000.000	12 dokumen	10.285.000.000	PROVINSI JAMBI

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025
DPM-PTSP Provinsi Jambi

X.XX.01.1.04.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	n/a	100 paket	80.000.000	14 bulan	10.000.000.000,0	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	80.000.000	12 dokumen	285.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Periode penyediaan administrasi umum	12 paket	12 paket	917.000.000	12 bulan	986.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	6 paket	8 paket	45.049.360	6 paket	85.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 paket	4 paket	300.000.000	4 paket	380.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Periode penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	12 paket	41.976.000	0	0	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	12 paket	12 paket	24.731.800	12 paket	85.000.000	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	1 laporan	300.000.000	12 paket	36.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	385.849.011	12 laporan	455.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet	12 laporan	12 laporan	248.520.000	12 laporan	265.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode pelayanan umum kebersihan kantor	1 laporan	1 laporan	137.329.011	1 laporan	190.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode pemeliharaan barang milik daerah	64 unit	64 unit	519.372.000	64 unit	1.305.000.000,0	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	24 unit	24 unit	307.172.000	24 unit	450.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	40 unit	40 unit	62.200.000	40 unit	105.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	2 unit	3 unit	150.000.000	3 unit	750.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	10%	10%	440.000.000	Rp. 6,29 T	460.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Rp.3,9 Triliun	Rp.5,71 Triliun	300.000.000	2	460.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02.01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02.02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	n/a	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	210.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	6,4 Triliun	10%	700.000.000	Rp. 10, 31 triliun	900.000.000	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	6,4 Triliun	Rp. 9.37 triliun	700.000.000	1	900.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01.01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	n/a	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	400.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	500.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 90	Nilai 91, A	670.123.600	Nilai 92, A	1.230.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan	jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	550 kegiatan usaha	580 kegiatan usaha	670.123.600	600 izin	1.230.000.000	PROVINSI JAMBI

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025
DPM-PTSP Provinsi Jambi

	daerah provinsi							
2.18.04.1.02'01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	n/a	120 pelaku usaha	265.000.000	120 pelaku usaha	130.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02.02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	550 kegiatan usaha	580 kegiatan usaha	199.999.950	600 kegiatan usaha	680.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02.03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100 orang	110 orang	205.123.650	125 orang	420.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Melaporkan LKPM	1.205 pelaku usaha	5%	1.465.000.000	1.277 pelaku usaha	1.542.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB dan Melaporkan LKPM	n/a	1.205 pelaku usaha	1.465.000.000	1.277 pelaku usaha	1.542.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	300 pelaku usaha	708.566.500	330 pelaku usaha	590.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 kegiatan usaha	80 kegiatan usaha	559.988.404	90 kegiatan usaha	742.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	100 kegiatan usaha	100.000.000	100 kegiatan usaha	210.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal	n/a	1 dokumen	100.000.000	0	0	PROVINSI JAMBI
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	n/a	1 dokumen	100.000.000	0	0	PROVINSI JAMBI
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	n/a	1 dokumen	100.000.000	0	0	PROVINSI JAMBI
	TOTAL				17.102.000.000		17.658.000.000	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.036.500.00	177.622.800.00	160000000			29.374.500.00	174.052.000.00				98%	98%					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.830.149.00	0	0			138.016.900.00	0				95%	#DIV/0!					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.919.379.472.00	9570600946	9019167973			7.876.445.468.00	9.119.105.111.00				88%	95%					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.283.750.00	350916550	361894150			260.233.750.00	350.916.550				98%	100%					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000.00	45032000	65261000			9.000.000.00	29.809.903				100%	66%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.390.300.00	45049360	45049360			65.103.000.00	44.982.000				100%	100%					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.301.007.00	324650156	195825330			218.416.500.00	323.567.000				99%	100%					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.279.000.00	51300000	41976000			44.050.000.00	49.755.200				93%	97%					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.763.100.00	26214360	24731800			29.760.600.00	26.172.000				100%	100%					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.696.483.00	287625209	257765310			153.071.586.00	252.670.807				82%	88%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.116.048.00	419520245	248520000			161.185.818.00	194.794.690				81%	46%					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.027.851.00	137329011	137329011			169.124.600.00	136.210.900				99%	99%					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.437.200.00	307172000	307172000			337.182.900.00	302.316.300				98%	98%					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.350.000.00	62200000	62200000			82.200.000.00	62.200.000				96%	100%					

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	569.141.400.00	0	0		562.840.000.00	0			99%	#DIV/0!					
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	139.568.500.00	226999934	199999900		132.208.800.00	225.109.922.00			95%	99%					
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	147.924.651.00	0	0		133.515.720.00	0			90%	#DIV/0!					
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	146.239.200.00	414999962	379000299		142.760.576.00	388.944.688.00			98%	9%					
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	311.000.274.00	226123650	205123650		295.635.100.00	216.824.069.00			95%	96%					
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0.00	332000000	265000000		0.00	296.629.500.00			#DIV/0!	89%					
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	453.000.000.00	245000000	199999950		414.662.600.00	232.332.205.00			92%	95%					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	130.132.000.00	0	0		117.287.433.00	0			90%	#DIV/0!					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	362.079.450.00	531384444	708566500		318.111.000.00	484.552.694.00			88%	91%					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.984.550.00	255876556	559988404		228.072.985.00	210.253.262.00			90%	82%					
TOTAL															

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		periode RPJMD	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)		
		Tahun 0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)	0,4 Triliun	742.525.49	562.555.84					
2	Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)	3,5 Triliun	6.204.193.90	8.882.659.20					
3	Nilai IKM	A	A	A					

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar												
1	01	Bidang Urusan Penanaman Modal											
1	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	10%	10%	10%	20%	199%	10%	16%	161%	
1	01	01	01	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 9,4 Triliun	199%	Rp. 4,29 T	Rp. 6,9 T	161%
1	01	01	02	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	01	03	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	01	02		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi	10%	10%	10%	10.0	100%	10%	10%	100%
1	01	02	01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	Rp. 7, 78 Triliun	Rp. 7, 78 Triliun	Rp. 7, 78 Triliun	7.80	100%	Rp. 7,04 T	Rp.7 T	100%
1	01	02	01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	02	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	04	03	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 90, A	Nilai 90, A	Nilai 90, A	89,31 (A)	100%	Nilai 90, A	Nilai 89, A	100%
1	01	04	01	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	577 kegiatan usaha	103%	550 kegiatan usaha	650 kegiatan usaha	118%
1	01	04	02	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	114 pelaku usaha	114%	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100%
1	01	04	03	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	463 kegiatan usaha	83%	550 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	100%

1	01	04	04	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	110 orang	110 orang	110 orang	162 Orang	147%	100 Orang	102 orang	100%
1	01	04		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	3%	3%	3%	6.30%	210%	2%	3%	100%
1	01	04	01	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1.103 pelaku usaha	1.103 pelaku usaha	1.103 pelaku usaha	1.762 pelaku usaha	160%	1.071 Pelaku Usaha	1.080 Pelaku Usaha	100%
1	01	04	01	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	231 Pelaku Usaha	77%	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100%
1	01	04	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	51 kegiatan usaha	85%	11 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	363%
1	01	04	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	n/a	0%	0	0	0%
1	01	05		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	F100%	n/a	0%	100%	0%	0%

1	01	05	01	Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a	0%	0	0	0%
1	01	05	01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a	0%	0%	0%	0%
1	01	03	02	Dst									
			03										

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Jambi

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n- 1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)		Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)	0.44	0.48	0.5	0.6	0.74	0.56	0,67		
2	Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)		Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)	3.85	4.24	4.7	5.1	6.20	8.88	10.40		
3	Nilai IKM		Nilai IKM	A	A	A	A	A	A	A	A	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2025 nanti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program yang didukung oleh 11 (sebelas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan program ini yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebanyak 6 yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.285.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan honorarium pegawai tidak tetap dan honor

pejabat panitia kegiatan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan Pengadaan Dinas untuk Karyawan/ Karyawati DPM-PTSP Provinsi Jambi

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur DPM-PTSP dengan mengikuti diklat.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan alat listrik dan peralatan elektronik selama 12 bulan yang dipergunakan untuk kelancaran sarana penerangan bangunan kantor.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 380.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan pengadaan peralatan gedung dan perlengkapan kantor.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,-

Tujuan sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan atau fotocopy kantor.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,- Tujuan sub kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi tugas DPM-PTSP Provinsi Jambi selama 12 bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 265.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan dan pembayaran rekening listrik, jasa komunikasi, telpon, PDAM dan internet selama 12 bulan.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan pelayanan umum, penyediaan jasa kebersihan kantor dan taman serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya selama 12 bulan.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan paket pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk mensinergikan antara aparat DPM-PTSP, pengusaha PMA/PMDN dan stake holder dalam kontribusinya pada pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,-

Tujuan sub kegiatan tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jambi.

III. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan investasi potensial dan peluang investasi di Provinsi Jambi guna menarik investor dalam negeri dan luar negeri, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan promosi investasi potensial dan peluang investasi di provinsi Jambi guna menarik investor Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- Tujuan sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi Investor PMA/PMDN untuk berkonsultasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan berusaha melalui sistem perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000,-

Tujuan sub kegiatan terfasilitasinya pelaku usaha dan terpenuhinya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 680.000.000,-

Tujuan sub kegiatan jumlah izin dan non izin pelaku usaha yang terfasilitasi dari pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 420.000.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan mediasi jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan berusaha PMA/PMDN.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan PMA/PMDN terhadap pelaksanaan Penanaman Modal, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadin kewenangan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 590.000.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PMA/PMDN dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 742.000.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha dari pelaku usaha PMA/PMDN yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

3. Sub Kegiatan penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaku usaha PMA/PMDN yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal.

RENJA DPMPTSP 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Depeloment* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang,

Jambi, Februari 2024

Kepala Dinas,




Dr. Donny Iskandar, S.Sos, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19691125 199703 1 004

RENJA DPMPTSP 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2					3
						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEN
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pe
	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan T
	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Ber

	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi
	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengg
	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber L
	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kan

	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya P
	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lai
	2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kan
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanam
	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Pro
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penana
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2	18	04	1.01	0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pe
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan t
	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusi
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hamb

	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024
4	5	6	7

g TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ANAMAN MODAL

Nilai Sakip	BB Nilai		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-		

erangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Periode penyediaan administrasi keuangan	-		

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
---------------------------------------------------	--	--	--

Tugas

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Jumlah Pegawai dan PTT DPMPTSP Provinsi Jambi	-		

dasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
Periode penyediaan administrasi umum	-		

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

in Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
----------------------------------------------------------------	--	--	--

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
----------------------------------------------------	--	--	--

gandaan

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
-----------------------------------------------------------	--	--	--

l)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
---------------------------------------------------------------------	--	--	--

Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-		
-----------------------------------------------------------	---	--	--

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

tor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Periode pemeliharaan barang milik daerah	-		
------------------------------------------	---	--	--

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

nya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
----------------------------------------------------	--	--	--

itor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	10 Persen		
--------------------------------------------	-----------	--	--

Jumlah realisasi investasi	-		
----------------------------	---	--	--

an Modal Daerah Provinsi

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			
------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

vinsi

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi			
------------------------------------------------	--	--	--

Persentase Peningkatan Rencana Investasi	10 Persen		
------------------------------------------	-----------	--	--

Jumlah Rencana Investasi	-		
--------------------------	---	--	--

man Modal Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi			
----------------------------------------------------------------	--	--	--

Nilai indeks kepuasan masyarakat	91 (A) Indeks		
----------------------------------	---------------	--	--

jumlah pelayanan dan pengaduan yang diterima	-		
----------------------------------------------	---	--	--

laporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-		
-----------------------------------------------------------------------	---	--	--

consultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

aha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	6 Persen		
---------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--

Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	-		
-----------------------------------------------------------------	---	--	--

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

atan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

3

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
8	9	10	11
	13.018.250.000,00		
	13.018.250.000,00		
	13.018.250.000,00		
BB Nilai	12.037.230.820,00		
8 Dokumen	166.000.000,00		
10 Dokumen	166.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12 Bulan	10.435.086.795,00		
70 Orang/ Bulan	9.636.846.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12 Dokumen	798.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
100 Orang	104.000.000,00		

50 Orang	104.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12 Bulan	411.287.475,00		

6 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
---------	---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

4 Paket	172.842.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
---------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

12 Paket	30.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
----------	---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

12 Paket	24.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
----------	---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

1 Laporan	164.073.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-----------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

12 Bulan	378.000.000,00		
----------	----------------	--	--

12 Laporan	243.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
------------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

1 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-----------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

60 Unit	542.856.550,00		
---------	----------------	--	--

24 Unit	307.456.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
---------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

40 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
---------	---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

3 Unit	195.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
--------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

10 Persen	185.000.000,00		
-----------	----------------	--	--

6.28 T Rupiah	185.000.000,00		
---------------	----------------	--	--

1 Dokumen	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-----------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-----------	------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

10 Persen	180.998.700,00		
-----------	----------------	--	--

10.31 T Rupiah	180.998.700,00		
----------------	----------------	--	--

1 Dokumen	180.998.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-----------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

91 (A) Indeks	489.003.000,00		
---------------	----------------	--	--

120 orang	154.000.000,00		
-----------	----------------	--	--

600 Kegiatan usaha	154.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
--------------------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

600 Izin	335.003.000,00		
----------	----------------	--	--

125 Pelaku Usaha	178.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
------------------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

120 Pelaku Usaha	157.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
------------------	----------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

6 Persen	126.017.480,00		
----------	----------------	--	--

1277 Pelaku Usaha	126.017.480,00		
-------------------	----------------	--	--

90 Kegiatan usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-------------------	------	-------------------------------------------------------	---------------------------------

100 Kegiatan usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
--------------------	------	-------------------------------------------------------	------------------------------

330 Pelaku Usaha	126.017.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
------------------	----------------	-------------------------------------------------------	------------------------------

J U M L A H	13.018.250.000,00		
--------------------	--------------------------	--	--

Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan M
Nasional	Daerah		Target
12	13	14	15
			BB Nilai
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	-
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	-
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	-

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	-

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	-
---	-------------------------------------------------------------	---	---

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	-
---	-------------------------------------------------------------	---	---

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

-	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	-	
---	-------------------------------------------------------------	---	--

			10 Persen
--	--	--	-----------

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	-
---	--------------------------------------	---	---

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

			10 Persen
--	--	--	-----------

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	-
---	--------------------------------------	---	---

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

			91 (A) Indeks
--	--	--	---------------

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	-
---	--------------------------------------	---	---

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	-
---	--------------------------------------	---	---

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

			6 Persen
--	--	--	----------

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	-
---	--------------------------------------	---	---

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah	-	
---	--------------------------------------	---	--

--	--	--	--

aju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pagu Indikatif (Rp)	
16	17
702.650.000.000,00	
702.650.000.000,00	
702.650.000.000,00	
14.470.000.000,00	
185.000.000,00	
185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
11.290.000.000,00	
11.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
290.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
95.000.000,00	

95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
1.055.000.000,00	
95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
420.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
485.000.000,00	
275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

1.360.000.000,00	
470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
770.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
490.000.000,00	
490.000.000,00	
270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
520.000.000,00	
520.000.000,00	
520.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
685.600.000.000,00	

685.000.000.000,00	
--------------------	--

685.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
--------------------	-----------------------------------

600.000.000,00	
----------------	--

450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
----------------	-----------------------------------

150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
----------------	-----------------------------------

1.570.000.000,00	
------------------	--

1.570.000.000,00	
------------------	--

750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
----------------	-----------------------------------

220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
702.650.000.000,00	